

Ketua DPRD Kalsel Harapkan Peningkatan PAD Lewat Wisata



Sumber gambar:

<https://jurnalkalimantan.com/dorong-peningkatan-pad-pariwisata-dprd-kalsel-minta-anjungan-tmii-dikembangkan/>

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr (HC) H Supian HK SH MH mengharapkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD lewat potensi wisata.

Harapan itu dia kemukakan saat reses di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), 1 - 8 Mei lalu, ujar Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Dedy Noriadi melalui WA-nya, malam Senin (10/5).

Menurut Ketua Dewan provinsi tersebut, penting untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada sebagai perwujudan bahwa suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah.

"Sebagaimana halnya meningkatkan potensi wisata di sini juga bisa meningkatkan PAD dan lapangan pekerjaan untuk warga setempat dan sekitar," ujarnya saat reses di Desa Banyu Hiranng (sekitar 185 kilometer utara Banjarmasin), HSU.

"Semua itu dari kita untuk kita," tegas politikus senior Partai Golkar tersebut ketika reses di Desa Banyu Hiranng, Rabu (5/5), seperti dikutip Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel.

Terlebih, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, di Desa Banyu Hirang sudah mulai dibuka wisata rawa.

Seperti "Rumah Singgah Terapung" yang warga setempat memberinya nama, dengan sejumlah gazebo apung yang dihubungkan oleh jalan titian di atas rawa dengan pemandangan yang memanjakan mata, demikian Supian HK.

Masyarakat setempat menyambut baik apa yang disampaikan H. Supian HK, mereka berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menormalisasi rawa dan bantuan bibit ikan, sehingga lahan rawa dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal lagi, tambah Dedy Noriadi.

Sumber berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com/dorong-peningkatan-pad-pariwisata-dprd-kalsel-minta-anjungan-tmii-dikembangkan/>, 5 Jul 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/253606/ketua-dprd-kalsel-harapkan-peningkatan-pad-lewat-wisata>, 10 Mei 2021.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu